

## **ABSTRAKS**

**Nurrobiatu Adawiyah (2018): “Analisis Upaya Pencairan Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung)”.**

Pajak merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peran penting dalam rangka membiayai jalannya pemerintahan di daerah. Dari sembilan mata pajak yang menjadi sumber pendapatan daerah Kota Bandung, terdapat Pajak Bumi dan Bangunan yang sejak tahun 2013 dikelola oleh daerah. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung, tapi meskipun penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah meningkat, perkembangan jumlah tunggakan pajak daerah terus membesar dan diantara pajak yang dikelola oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Bandung, Pajak Bumi dan Bangunan-lah yang memiliki angka piutang pajak paling besar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pencairan tunggakan PBB di BPPD Kota Bandung, mengetahui faktor apa saja yang menghambat pencairan tunggakan PBB di BPPD Kota Bandung, dan mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh BPPD Kota Bandung untuk mencairkan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan

Penulis menggunakan teori menurut Widyaningsih (308: 2013) tentang tindakan penagihan pajak (a) Surat Teguran (b) Surat Paksa (c) Surat Sita (d) Lelang.

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Informan pada penelitian ini adalah Kepala Sub Bidang PBB BPPD Kota Bandung, dan Staff Fungsional PBB BPPD Kota Bandung. Teknik analisis data yang digunakan menurut Silalahi, yaitu: (1) Reduksi data, (2) Penyajian data, (3) Menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPPD Kota Bandung dalam melakukan penagihan untuk mencairkan tunggakan pajak, belum sepenuhnya mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Faktor penghambat pencairan tunggakan diantaranya: kurangnya SDM untuk melakukan penagihan pajak, rendahnya kepatuhan Wajib Pajak, ketidaksesuaian data dengan keadaan lapangan, Wajib Pajak yang tidak bisa membayar tunggakan, serta kurang tegasnya hukum dan sanksi yang diberlakukan. Upaya pencairan yang dilakukan BPPD Kota Bandung adalah dengan melakukan sensus PBB tahun 2017, serta pembebasan denda PBB.

**Kata Kunci: Pencairan Tunggakan, Penagihan, Pajak Bumi dan Bangunan**

## **ABSTRACT**

**Nurrobiatu Adawiyyah (2018): "Analysis of Arrears Efforts to Disburse Land and Building Tax (Case Study of Bandung Regional Revenue Management Agency)".**

*Tax is one source of Regional Revenue that has an important role in financing the running of government in the region. Of the nine tax eyes that are the source of revenue in the city of Bandung, there are Land and Building Taxes which since 2013 have been managed by the regions. Realization of Land and Building Tax revenue increases the Regional Original Revenue of the City of Bandung, but even though regional tax revenues and Regional Original Income increase, the development of the number of regional tax arrears continues to grow and among taxes managed by the Bandung City Revenue Management Agency, the Land and Building Tax which has the largest number of tax receivables.*

*This study aims to determine the implementation of the disbursement of UN arrears in Bandung BPPD, to find out what factors hinder the disbursement of UN arrears in BPPD Bandung, and find out what efforts were made by BPPD Bandung to withdraw the Land and Building Tax arrears.*

*The author uses Law Number 19 of 2000 concerning Tax Collection with a Forced Letter consisting of (1) Letter of invoice, (2) Forced letter, (3) Seizure letter (4) Auction.*

*The research method uses qualitative methods with a descriptive approach. Data was collected through interviews, observation, and documentation studies. The informants in this research were the Head of Land and Building Tax Sub-Division of BPPD Bandung, and Land and Building Tax Functional Staff of BPPD Bandung. The data analysis technique used according to Silalahi, namely: (1) Data reduction, (2) Presentation of data, (3) Drawing conclusions.*

*The results of the study show that the BPPD of Bandung City in making bills to disburse tax arrears, has not fully implemented Law Number 19 of 2000 concerning Tax Collection with Forced Letters. Factors that inhibit delinquency include: lack of human resources to collect taxes, low compliance of taxpayers, incompatibility of data with field conditions, taxpayers who cannot pay arrears, and lack of strict law and sanctions imposed. Disbursement efforts carried out by Bandung City BPPD are by conducting a 2017 tax census, as well as exemption from Land and Buliding Taxes fines.*

**Keywords: Disbursement of arrears, Billing, Land and Building Tax**